

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Banten adalah provinsi wilayah paling barat di Pulau Jawa Indonesia. Provinsi Banten pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Banten adalah salah satu tujuan tempat wisata di Indonesia, Banten menyimpan banyak sekali lokasi wisata yang seru dan menyenangkan. Banyak tempat yang tidak pernah sepi pengunjung. Mereka yang berkunjung ke kawasan banten tidak hanya berasal dari wilayah Banten itu sendiri saja, namun banyak pengunjung wisatawan yang berasal dari daerah lain bahkan pengunjung yang berasal dari luar negeri.

Banten memiliki banyak objek wisata yang memberikan keindahan baik objek wisata alami bahkan buatan yang bisa menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi Banten. Ini terlihat dari hasil statistik jumlah kunjungan wisatawan kabupaten/kota di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini berarti kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki potensi

besar pada sektor pariwisata, dan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah salah satunya yaitu berpengaruh terhadap pajak daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal¹.

Sebagai salah satu yang memiliki eksotisme alamnya, Provinsi Banten memiliki potensi pariwisata yang luar biasa banya dan variatif, tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota, tercatat hamper 344 jenis wisata alam, 231 jenis wisata buatan dan hamper 591 jenis wisata religi, sejarah budaya dan wisata ziarah.

Antusiasme wisatawan ke Banten bisa dilihat dari data kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan lokal yang berwisata ke objek wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten

¹ Syarifah Naili Rahmi, Skripsi "*Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*" hal.3

sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 17.98 juta. Menurut statistic wisatawan nusantara tahun 2018, Provinsi banten menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara dengan jumlah inbond sebesar 10.354.240, daya saing sebagai daerah tujuan wisata Provinsi Banten menempati urutan ke tujuh setelah sumatera utara. Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan Provinsi Banten merupakan sektor prospektif untuk ditingkatkan sebagai salah satu sektor unggulan di Provinsi Banten.²

Pariwisata adalah sumber utama penggerak ekonomi di negara berkembang. Sektor wisata seperti ekowisata dan wisata pedesaan banyak yang dikunjungi wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu industri yang padat karya. Pengembangan industri ini juga menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan daerah, selain itu sector pariwisata dapat merangsang investasi infrastruktur baru untuk menunjang keberlangsungan pariwisata dalam suatu daerah. Untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah perlu mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata, agar sektor pariwisata berdampak terhadap

² Dinas Pariwisata Provinsi Banten, <https://dispar.bantenprov.go.id>, diakses pada tanggal 29 April pukul 11:30 am

kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satu diantaranya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Sektor pariwisata merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu program pengembangan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi³.

Pariwisata memiliki peran penting yang berkaitan erat terhadap hotel dan restoran, semakin banyak wisatawan berkunjung maka pengunjung hotel dan restoran juga akan meningkat. Karena wisatawan akan mencari tempat untuk beristirahat disela-sela mereka berlibur dan juga akan mencari tempat penyedia makanan dan minuman yaitu restoran. Hotel dan restoran erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena setiap hotel dan restoran akan mengeluarkan pajak setiap tahunnya, dimana pajak tersebut akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan Pajak Daerah, dimana Pajak

³ Dzikri Purnomo, Skripsi “*Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten*”, (Serang, Repository UIN Banten, 2018), Hal 1-2

daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pendapatan lainnya. Pajak daerah merupakan sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang baik untuk di kembangkan. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola dengan baik dalam rangka kontribusinya terhadap pendapatan pemerintah.⁴

Pariwisata menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dalam suatu Negara. Pariwisata merupakan salah satu industry yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja., pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sector produksi lain di dalam penerima wisatawan. Pariwisata memunculkan pilihan yang menarik bagi negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita dan pendapatan

⁴ Ida Bagus Agastya Brahmata Wijaya dan I Ketut Suidiana, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangali Periode 2009-2015", *E-jurnal EP Unud*, Vol.V, No. 12 (Desember 2016)

pemerintah yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu Negara.⁵

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya alam nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Ni Luh Gde Ana Pratiwi, "Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar" *E-Jurnal EP Unud*, Vol.3, No.12, 18 Maret 2014

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiscal adalah terciptanya kemandirian daerah. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintah memerlukan dukungan pendanaan, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan-urusan daerah itu sendiri. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁶

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar. Pendapatan pajak

⁶ Jessica Carolina Tendean, Sutomo Wim Palar, Krest Donald Tolosang, *“Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening Variabel”* Hal.2

daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yang berhubungan langsung dengan peningkatan pajak daerah adalah pajak hotel dan restoran. Keberadaan penginapan/hotel dan restoran memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi jumlah kunjungan hotel dan restoran akan semakin tinggi juga pendapatan pajak daerah.

Peningkatan jumlah kunjungan hotel dan restoran tidak luput dari besarnya pengaruh jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan dari luar kota maupun luar negeri ke Banten maka akan berpengaruh terhadap kunjungan hotel dan restoran. Karena wisatawan dari luar kota atau luar negeri, pasti mereka membutuhkan tempat untuk beristirahan/menginap dan restoran untuk mereka makan memenuhi kebutuhan tenaga mereka.

Berikut adalah data salah satu kunjungan wisatawan dan pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Pendapatan Pajak Kabupaten

Tahun	Jumlah Wisatawan	Pendapatan Pajak Daerah
2015	80.624	1.162.520.779
2016	94.311	1.301.030.413
2017	5.150.667	1.836.701.036
2018	102.270	1.915.261.073

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Data diolah penulis)

Dari sampel yang diambil kabupaten tanggerang dari tahun 2015-2018 pendapatan pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun berbeda dengan jumlah kunjungan wisatawan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 5.150.667 sedangkan tahun 2018 turun drastis menjadi 102.270.

Ketika jumlah wisatawan mengalami peningkatan atau penurunan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah, karena indikator pajak daerah salah satunya yaitu dari

pajak hotel dan restoran. Ketika jumlah pengunjung wisata semakin meningkan/menurun maka akan berpengaruh terhadap pendapatan hotel dan restoran, secara otomatis akan ada pengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Namun peristiwa penurunan angka kunjungan wisatawan tidak dibarengi dengan pendapatan pajak daerah, ini artinya ada faktor lain yang mempengaruhi ketidak relefanan ini.

Maka dengan ini penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti pengaruh pariwisata terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan variabel jumlah wisatawan dan pendapatan pajak daerah, dengan judul penelitian:

“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015-2018”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan pariwisata kurang maksimal
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah
3. Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata pentingnya pembayaran pajak
4. Kurangnya penyediaan fasilitas aplikasi pajak dan wisata
5. Sarana transportasi dan akses pariwisata kurang baik

C. Pembatasan masalah

Dalam suatu penelitian sangatlah penting adanya pembatasan masalah agar lebih fokus terhadap masalah tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Fokus penelitian yaitu hanya mengenai jumlah wisatawan dan pajak daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
2. Penelitian dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten
3. Penelitian difokuskan pada runtut waktu tahun 2015-2018

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil kesimpulan rumusan masalah yaitu

bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan wisata di Kabupaten/Kota Provinsi Banten sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

2. Bagi Pihak Lain

Manfaat bagi pihak lain bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi sehingga dapat mengetahui seberapa

berpengaruhnya jumlah wisatawan terhadap pendapatan pajak daerah

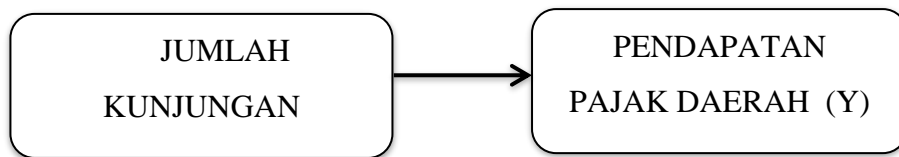
3. Bagi peneliti

Manfaat bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan peran wisata terhadap pertumbuhan pendapatan pajak daerah melalui penerapan ilmu dan teori yang dimiliki penulis selama berada di bangku perkuliahan dan mengaplikasikan kedalam penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pihak akademik

G. Kerangka Pemikiran

Majunya sektor pariwisata disuatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara. Semakin banyaknya wisatawan berkunjung maka akan memberi dampak yang positif bagi daerah tujuan wisata (DWT) terutama sebagai

sumber pendapatan daerah.⁷ Dengan demikian kerangka pemikirannya sebagai berikut



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Menurut KBBI wisatawan adalah orang yang berwisata/ pelancong/ turis. Wisatawan adalah orang yang mengunjungi suatu destinasi wisata yang terdapat disuatu daerah dengan tujuan untuk bersiwata. Wisatawan terbagi dengan wisatawan domestik yaitu wisatawan yang berasal dalam negeri dan wisatawan asing yaitu wisatawan yang datang dari negara lain

Pajak daerah menurut Undang-Undang n0. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

⁷ Novi Dwi Purwanti, Retno Musika Dewi, *engaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*". Vol. No. Hal.4

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran.⁸

Pajak daerah kabupaten/kota berasal dari beberapa aspek yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan.atau bangunan.

Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapata Pajak Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang memiliki kelengkapan data pada tahun 2015-2018

⁸Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018 h. 58